

BAB VIII

PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini

8.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua cukup berfluktuasi. Perekonomian wilayah Papua yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian menyebabkan fluktuasi pada sektor tersebut langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sebesar -22,5 persen dan pada tahun 2008 tumbuh sebesar -1,5 persen. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 7,4 persen di tahun 2004 dan tumbuh sebesar 8,6 persen pada tahun 2008. Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Papua dapat dilihat pada Tabel 8.1 berikut ini.

TABEL 8.1
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PAPUA TAHUN 2004—2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN)

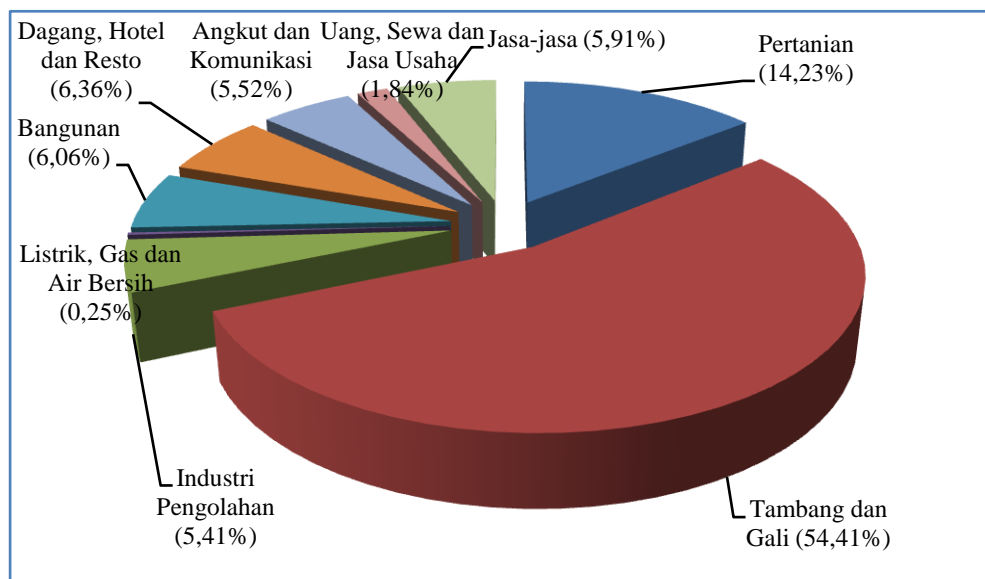
Tahun	Papua Barat	Papua
2004	7,4	-22,5
2005	6,8	36,4
2006	4,6	-17,1
2007	6,9	4,3
2008	8,6	-1,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data triwulan 1 tahun 2008, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian di wilayah Papua. Sementara itu, sektor pertanian, terutama kehutanan, juga menjadi kontributor utama bagi perekonomian wilayah Papua. Kontribusi sektor sekunder dan tersier masih relatif lebih rendah, yaitu di bawah 10 persen. Kedua provinsi di atas mempunyai kendala yang

sama, yaitu ketersediaan listrik dan air bersih seperti terlihat dari kontribusi sektor tersebut pada perekonomian yang cukup kecil, yaitu hanya sebesar 0,25 persen. Secara lengkap, kontribusi tiap sektor bagi perekonomian wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 8.1 sebagai berikut.

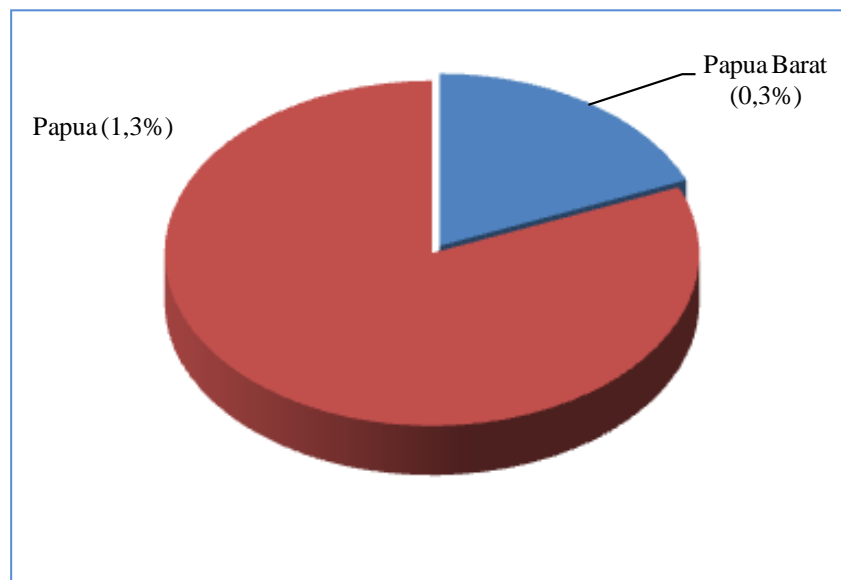
GAMBAR 8.1
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH PAPUA MENURUT SEKTOR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Papua terhadap perekonomian nasional pada tahun 2008 adalah 1,6 persen. Sementara itu, kontribusi perekonomian provinsi di wilayah Papua terhadap perekonomian wilayah nasional sebagian besar berasal dari perekonomian di Provinsi Papua sebesar 1,3 persen terhadap perekonomian nasional atau lebih dari 80 persen total perekonomian wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu 0,3 persen terhadap perekonomian nasional atau hanya kurang dari 20 persen terhadap total perekonomian wilayah Papua. Kontribusi ekonomi wilayah Papua terhadap perekonomian nasional dapat dilihat pada Gambar 8.2 berikut ini.

GAMBAR 8.2
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH PAPUA TERHADAP EKONOMI NASIONAL ATAS
DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Di Provinsi Papua terdapat potensi pengolahan kakao dengan luas penanaman yang terus bertambah di beberapa kabupaten. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dari segi jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, terbatasnya sarana produksi terutama pestisida, terbatasnya sumber dana pengembangan kakao, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya proses pengolahan. Di Provinsi Papua juga terdapat potensi pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan pengolahan kakao, yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dalam aspek jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, rendahnya nilai tambah produksi biji kopi kering, terbatasnya sarana produksi, rendahnya proses pengolahan dan pengeringan biji kopi dan belum tertatanya kelembagaan di tingkat petani plasma.

Di Provinsi Papua Barat terdapat potensi pengolahan hasil laut yang berpeluang untuk dikembangkan. Hasil ikan laut utama mencakup udang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, sotong yang dipasarkan dalam bentuk segar atau dikeringkan melalui proses penggaraman, pengasapan, pembekuan, pengalengan, dan proses lain. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas ikan sebagai akibat kurangnya infrastruktur, rendahnya produktivitas sebagai akibat rendahnya teknologi pengolahan yang digunakan, terbatasnya pemasaran hasil pengolahan, kurangnya diversifikasi produk-produk hasil laut, kurang kondusifnya iklim usaha, rendahnya investasi pengolahan

hasil laut, kurangnya sumber daya manusia dalam penangkapan dan pengolahan hasil laut, masih sederhananya sarana dan prasarana pendukung penangkapan dan pengolahan, serta belum adanya kemitraan antara masyarakat petani nelayan dan industri pengolahan.

Dalam aspek perdagangan, wilayah Maluku dan wilayah Jawa dan Bali merupakan dua mitra dagang penting wilayah Papua. Ikatan perdagangan dengan wilayah Maluku terkait dengan kedekatan kondisi geografis wilayah tersebut. Dalam kerangka pengembangan potensi kerja sama, ada empat wilayah lain perlu diidentifikasi sebagai daerah berpotensi untuk perluasan kerja sama perdagangan terutama yang memungkinkan penghematan biaya dan oportunitas dalam pergerakan barang dan jasa.

Persetujuan investasi PMDN pada tahun 2008 adalah 1.45 persen dari total persetujuan PMDN secara nasional. Sementara itu, investasi PMA pada tahun 2008 adalah 0.13 persen pada tahun 2008 terhadap total investasi PMA secara nasional. Investasi asing yang paling dominan di Provinsi Papua adalah pada bidang pertambangan dan kehutanan kemudian diikuti industri perkebunan (tebu), perikanan, dan peternakan. PMDN banyak dilakukan oleh perusahaan yang berbasis sumber daya alam, pertanian dan perkebunan, dan investasi dominan adalah perkebunan kelapa sawit terpadu, perikanan, dan kehutanan diikuti oleh sektor peternakan budi daya sapi potong.

Dalam kurun lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Papua terus meningkat. Pendapatan per kapita di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua Barat (**Tabel 8.2**).

TABEL 8.2
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH PAPUA TAHUN 2004-2008
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM RIBU RUPIAH)

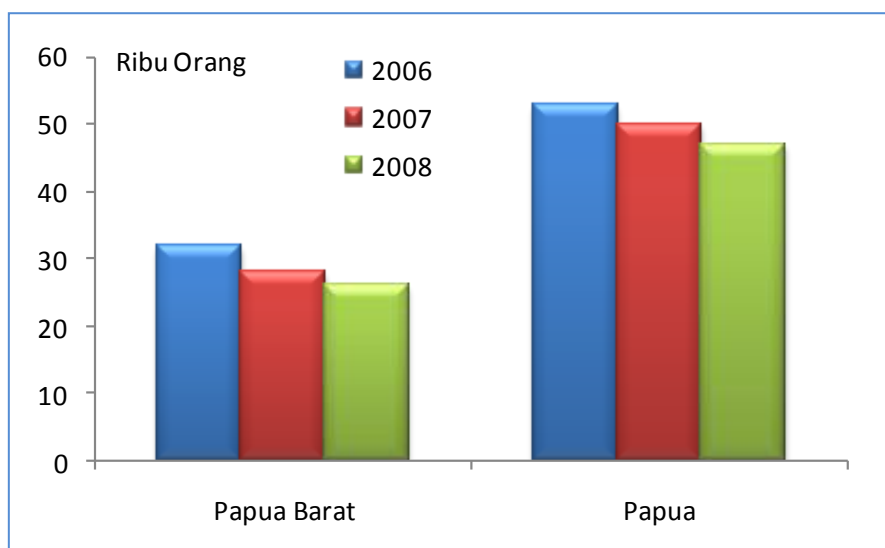
Tahun	Papua Barat	Papua
2004	7,735	8,690
2005	7,712	11,479
2006	7,903	9,318
2007	8,288	9,526
2008	8,725	9,198

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk wilayah Papua hanya berjumlah sekitar 2,8 juta jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk nasional. Wilayah Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, di antara wilayah lain di Indonesia, yaitu hanya sebesar 7 jiwa per km². Angka rata-rata anggota rumah tangga yang kecil menunjukkan kesiapan untuk melakukan modernisasi kehidupan. Konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman tetapi proporsi penduduk di perkotaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pergeseran kepadatan penduduk dari desa ke kota tersebut mengindikasikan tingginya tingkat urbanisasi di Papua. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk lokal di wilayah Papua relatif besar, tetapi proporsi penduduk pendatang terus meningkat.

Jumlah penganggur di Provinsi Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengangguran di Provinsi Papua Barat. Jumlah penganggur di Provinsi Papua cenderung menurun dalam periode 2006—2008. Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 26 ribu orang, sedangkan pengangguran di Provinsi Papua sebesar 47 ribu orang.

GAMBAR 8.3
JUMLAH PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2006—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Tingginya persentase kemiskinan dan masih sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan permasalahan utama yang terjadi di sebagian besar wilayah Papua. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat adalah 35,7 persen dan Provinsi Papua 37,5 persen. Data kemiskinan antarprovinsi menunjukkan dominasi penyebaran di perdesaan, baik berdasarkan

jumlah maupun persentase penduduk miskin. Di Provinsi Papua, jumlah dan persentase penduduk miskin, baik di kota maupun di desa cenderung menurun dalam periode 2000—2008. Walaupun persentase penduduk miskin di perdesaan cenderung menurun, persentase tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Demikian pula dengan di Provinsi Papua Barat, persentase penduduk miskin di perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan secara umum.

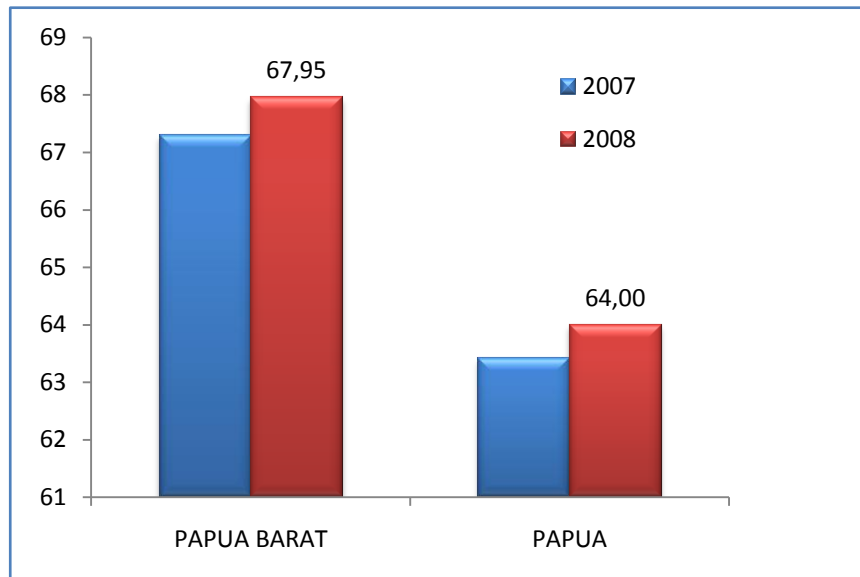
TABEL 8.3
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2009

Tahun	Papua Barat	Papua
2007	39,3	40,8
2008	35,1	37,1
2009	35,7	37,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kualitas sumber daya manusia wilayah Papua cenderung masih rendah sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua. Pada tahun 2008 IPM di Provinsi Papua sebesar 64,0 dan Provinsi Papua Barat sebesar 67,95.

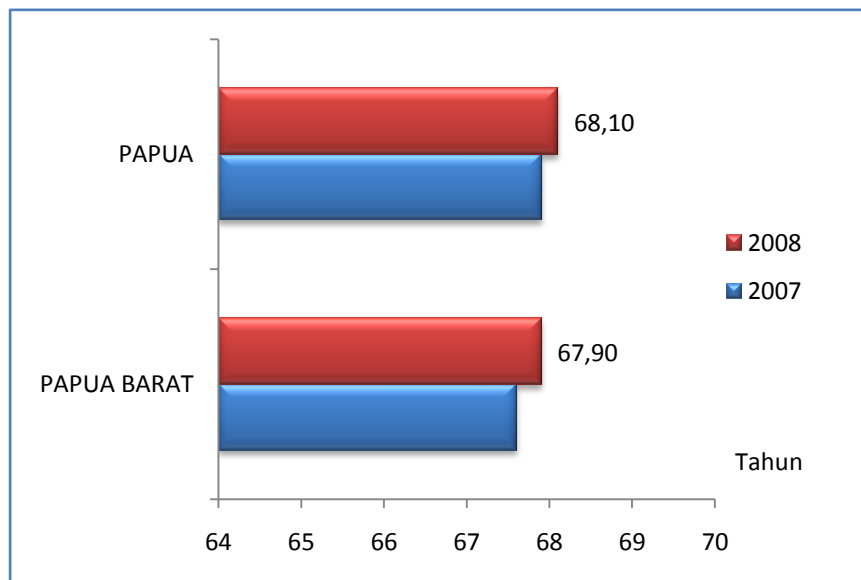
GAMBAR 8.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek kesehatan angka umur harapan hidup (UHH) tergolong rendah. Angka UHH pada tahun 2008 di Provinsi Papua adalah 68,10 tahun, sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah 67,90 tahun. Di wilayah Papua angka kematian bayi (AKB) tergolong tinggi. Persalinan yang dibantu tenaga medis masih tergolong rendah. Penduduk yang mempunyai keluhan terhadap kondisi kesehatan semakin meningkat. Penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan sedikit lebih kecil daripada yang berupaya mengobati dirinya sendiri. Masalah penyediaan akses penduduk terhadap air bersih belum memadai. Kelayakan rumah tinggal yang memenuhi kelayakan kesehatan masih sedikit karena sebagian besar rumah tinggal penduduk tidak memiliki sirkulasi udara yang baik yang menyebabkan asap pekat dari perapian dari dalam rumah mengganggu pernapasan dan berakibat banyaknya penduduk yang terkena penyakit paru-paru. Penderita AIDS di Pulau Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia. Jumlah penderita meningkat dari 1.070 jiwa (2005) menjadi 3.000 jiwa (2007). Kasus AIDS/HIV meningkat tajam dari 554 kasus baru tahun 2003 menjadi 4.114 kasus tahun 2008.

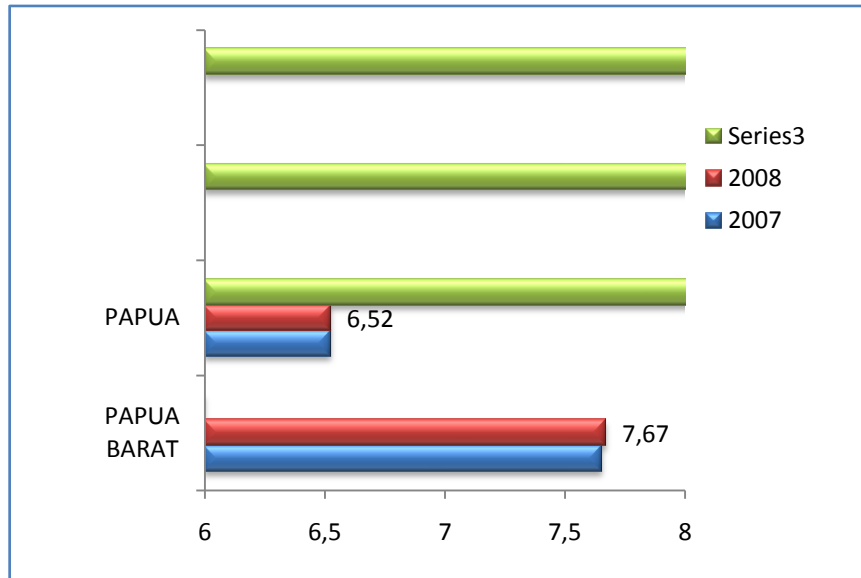
GAMBAR 8.5
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dalam aspek pendidikan di wilayah Papua, rata-rata lama sekolah belum mencapai target wajib belajar 9 tahun dan belum semua penduduk usia sekolah dapat bersekolah. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua adalah 6,52 tahun dan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat adalah 7,67 tahun. Layanan SD sudah mencukupi di Pulau Papua, tetapi, layanan kelas untuk SLTP dan SLTA tidak mencukupi. Penyebaran guru di Provinsi Papua tidak merata dan sebagian besar berkonsentrasi di kota dan sebagian meninggalkan tugas karena menjadi anggota legislatif atau eksekutif untuk daerah pemekaran baru.

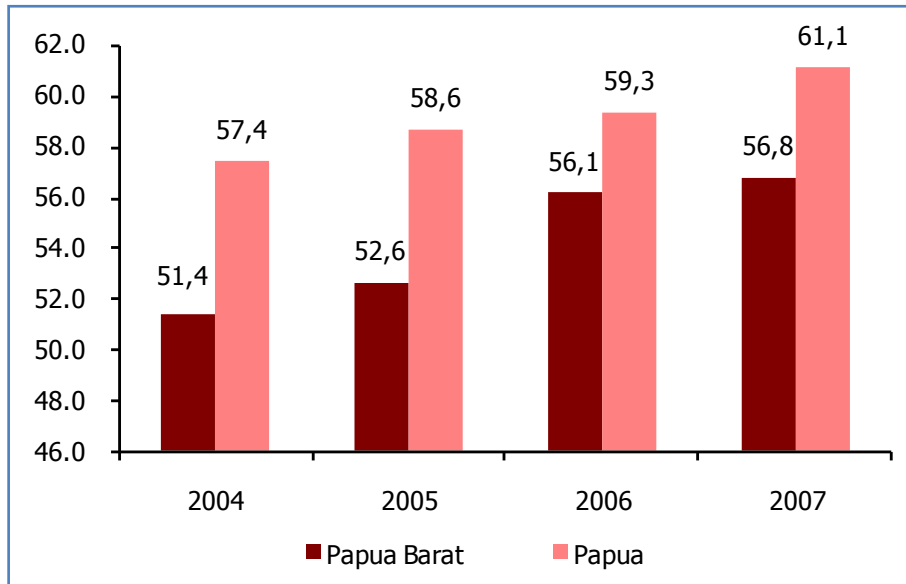
GAMBAR 8.6
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH PAPUA TAHUN 2007—2008



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) Indonesia, dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Papua meningkat pada tahun 2007 walaupun peningkatannya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 65,8. IPG di Provinsi Papua sebesar 61,1 dan di Provinsi Papua Barat sebesar 56,8. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Papua.

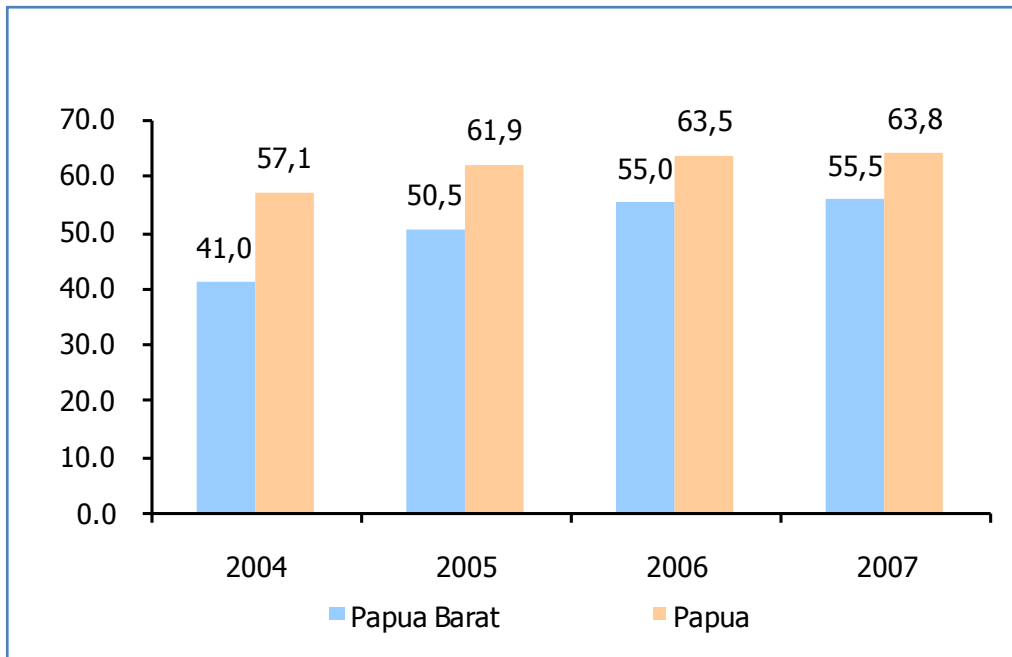
GAMBAR 8.7
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH PAPUA TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Papua, IDG tahun 2007 untuk tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 meskipun nilainya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 63,8 dan 55,5. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan juga perlu ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan salah satu prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

GAMBAR 8.8
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER WILAYAH PAPUA TAHUN
2004—2007



Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah)

Wilayah Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang dapat dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah. Wilayah Papua terletak di posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Pengembangan wilayah Papua menghadapi permasalahan yang sangat kompleks terutama akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Pengembangan wilayah Papua juga memiliki tantangan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan wilayah lain. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Program pembangunan harus dirancang secara khusus sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat Papua. Kondisi geografis juga menghambat mobilitas sumber daya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Terbatasnya ketersediaan jaringan transportasi tersebut menyebabkan masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan dan lemahnya pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan wilayah yang sering menyebabkan munculnya potensi konflik dan separatisme.



Sebagai satu kesatuan wilayah, Papua sesungguhnya juga memiliki potensi pengembangan sangat besar yang berbasis kepada sumber daya alam terutama pertambangan, hutan, perikanan, perkebunan dan wisata bahari. Saat ini pengelolaan sumber daya tambang dan hutan belum memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kemajuan daerah maupun tingkat kesejahteraan penduduk. Potensi sumber daya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Peluang untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan perkebunan secara baik dan benar juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah.

Rasio panjang jalan di Provinsi Papua 3,2 km per 1.000 penduduk. Di Papua Barat rasio panjang jalan 2,8 km per 1.000 penduduk. Transportasi laut berperan penting pada perekonomian karena sebagian besar mobilitas orang dan barang menggunakan transportasi laut. Pada tahun 2006 terdapat empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Fak Fak dan Pelabuhan Kaimana. Selain itu, terdapat pelabuhan kecil yang melayani pelayaran perintis di daerah kepulauan, pesisir pantai dan sungai-sungai, yaitu pelabuhan perintis Wasior, Windesi, Oransbari, Saukorem, Sausapor, Saonek, Kalobo, Teminabuan, Inantawan, Bintuni, Babo dan Kokas. Transportasi udara menjadi penting karena karakteristik wilayah pegunungan diliputi hutan sehingga akses jalan darat menjadi sulit. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pembangunan prasarana perhubungan udara meliputi Lapangan Terbang Rendani di Manokwari, Domine Edward Osok dan Jefman di Sorong, Torea di Fak Fak, dan Tarum di Kaimana.

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masuk dalam sistem kelistrikan wilayah Papua yang terdiri atas beberapa sistem yang terisolasi, antara lain Sistem Jayapura, Biak, Sorong, Merauke, Manokwari, dan Timika. Rasio elektrifikasi tahun 2007 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah 32,05 persen dan rasio desa berlistrik untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah 30,2 persen. Kebutuhan tenaga listrik akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan penduduk. Semakin meningkat ekonomi pada suatu daerah, konsumsi tenaga listrik juga akan semakin meningkat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Rasio elektrifikasi diharapkan akan menjadi 90 persen pada tahun 2025.

Perkembangan penataan ruang di Pulau Papua hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai isu, di antaranya terkait dengan hak ulayat (hak kepemilikan tanah adat) dan batas administrasi. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat adat Pulau Papua tidak dapat merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam tanah leluhur masyarakat Papua yang meliputi tanah hutan dan isinya, badan air dan isinya, bahan tambang dan mineral, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangannya, banyak kegiatan eksploitasi mineral dan hutan yang dilakukan di atas tanah adat tanpa melibatkan masyarakat adat Pulau Papua itu sendiri. Selain isu tersebut, terdapat isu lain dalam

penataan ruang wilayah di Pulau Papua, yaitu konflik batas administrasi yang tidak hanya terjadi antarkampung, tetapi juga antardistrik.

Penggunaan kawasan hutan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Luas wilayah kawasan di Pulau Papua lebih dari 41 juta ha dari total luas kawasan nasional. Hal ini menunjukkan Pulau Papua memiliki keunggulan ekonomis dan lingkungan yang tinggi dipandang dari nilai hutan dan kekayaan alam serta habitatnya. Dari luas total kawasan hutan tersebut, proporsi terbesar digunakan sebagai kawasan budi daya (58 persen) dan selebihnya diperuntukkan bagi kawasan lindung. Hal ini sejalan dengan konsep tata ruang wilayah yang menyatakan bahwa kawasan budi daya seharusnya lebih luas jika dibandingkan dengan kawasan lindung meskipun tidak berarti bahwa kawasan lindung dapat semakin menurun mengingat fungsinya yang penting dalam sistem ekologi. Provinsi Papua memiliki luas wilayah lebih besar (77 persen) jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat (23 persen). Dari sekitar 31,8 juta hektare luas kawasan di Papua, 44 persen digunakan sebagai kawasan lindung dan 56 persen lainnya adalah kawasan budi daya. Demikian pula dengan Provinsi Papua Barat yang mempunyai kawasan budi daya sekitar dua kali lipat kawasan hutan lindung.

Sebagai pulau tropis yang terbesar di dunia, Pulau Papua memiliki keragaman dan keunikan ekosistem yang mengagumkan, termasuk glasier dan ekosistem alpine, hutan berkabut, hutan hujan dataran rendah, padang rumput, hutan Mangrove, terumbu karang dan hamparan rumput laut. Banyak spesies memiliki status endemik atau secara alamiah tidak dapat ditemukan di tempat lain. Secara keseluruhan, Pulau Papua memiliki sedikitnya 500.000 jenis flora dan fauna. Dari jumlah tersebut, diduga sekitar 20.000 sampai 25.000 jenis tanaman hidup di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di Pulau Papua, lebih dari 90 persen luas wilayah kawasan lindung dan budi daya diperuntukkan bagi hutan. Dalam hal ini, Provinsi Papua Barat menyediakan 94 persen (9 juta ha) dari luas wilayah (9,7 juta ha) untuk hutan dan Papua Barat menyediakan 91 persen (29 juta) dari 29 juta ha bagi hutan lindung dan budi daya.

Permasalahan lain yang menonjol ialah menyangkut pelaksanaan otonomi daerah seperti inkonsistensi produk peraturan daerah, pemekaran wilayah administrasi, dan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pelaksanaan otonomi khusus. Isu pemekaran wilayah dan pilkada tersebut memiliki dampak yang cukup panjang karena dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan, termasuk di antaranya konflik batas antarwilayah administrasi.

Hukum formal dan hukum adat hingga saat ini belum diatur secara harmonis dalam menangani masalah sosial, terutama yang terkait dengan sengketa hak ulayat dan konflik sosial budaya. Sementara itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah mengatur kekuasaan peradilan yang mengakui pula peradilan adat. Perkembangan ini menghasilkan dualisme hukum di wilayah Papua.

GAMBAR 8.9
PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH PAPUA



Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah)

Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat. Di kawasan perbatasan terjadi migrasi penduduk secara tradisional berkaitan dengan ikatan kekerabatan yang sudah lama terjalin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan wilayah perbatasan berpotensi pula menjadi jalan bagi penurunan keamanan dalam negeri. Sementara itu, belum ada sarana dan prasarana fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan di perbatasan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan publik dalam upaya pengawasan kawasan perbatasan secara intensif.

8.1.2 Isu Strategis

Dari uraian fakta potensi dan permasalahan di wilayah Papua, dapat ditarik beberapa isu strategis di wilayah Papua yaitu sebagai berikut.

1. **Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan**

Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya sektor dan komoditas unggulan pertambangan, perikanan laut dan perkebunan yang ditunjukkan dengan belum optimalnya industri unggulan kakao dan kopi sebagai motor penggerak perekonomian di Provinsi Papua serta industri unggulan hasil laut sebagai penggerak perekonomian Provinsi Papua Barat. Pengembangan sektor dan

komoditas unggulan perlu didorong dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur pendukung ekonomi, yaitu akses terhadap jalan, pelabuhan, listrik serta prasarana dan sarana pos dan telematika.

2. Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana

Hal ini berkaitan dengan masih adanya permasalahan batas desa dan fasilitas di daerah perbatasan serta rendahnya infrastruktur yang dapat diakses penduduk di pedalaman, tertinggal, dan perbatasan.

3. Optimalisasi tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus

Hal ini ditunjukkan oleh belum terimplementasikannya UU Otonomi Khusus secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya persentase kemiskinan

Rendahnya kualitas manusia merupakan konsekuensi rendahnya dan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah, rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat, serta tidak meratanya pendapatan per kapita. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingginya kemiskinan di perdesaan dan pedalaman serta rendahnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

5. Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS

Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kasus AIDS/HIV di perkotaan dan perdesaan di wilayah Papua.

6. Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal

Hal ini ditunjukkan oleh tingginya kasus kekerasan dan hak asasi manusia dan risiko konflik pertanahan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

7. Meningkatkan kebutuhan ketahanan pangan

Rendahnya luas panen dan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

8. Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana

Hal ini ditunjukkan oleh tingginya keragaman hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat serta tingginya potensi bencana alam di wilayah Papua, khususnya gempa bumi.

8.2 Arah Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan dan kesatuan serta keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat di dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah; (6) menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyetarakan laju pertumbuhan antarwilayah.

Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Papua diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan kota-kota Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Papua diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Fak Fak, Manokwari, Nabire, Biak, Merauke dan Wamena sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (2) mengendalikan pengembangan kota Bade, Muting, Arso, Ayamaru, Teminabuan, dan Sarmi sebagai pusat pelayanan tersier yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan pusat kegiatan lokal di wilayah Papua ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN, dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Papua.

8.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Papua, tujuan pembangunan wilayah Papua untuk kurun waktu 2010—2014 adalah untuk:

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua;
2. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar;
3. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat;
4. mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan;
5. melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah;
6. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
7. meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua;
8. mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.

Sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah Pulau Papua, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Papua untuk kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Papua ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan per kapita;
2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan di Papua;
5. meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam perekonomian wilayah Papua;
6. meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tambang dan hutan ;

7. berkembangnya jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua;
8. meningkatnya mutu pengelolaan otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.

TABEL 8.4
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%) ¹⁾		Kemiskinan (%) ²⁾		Pengangguran (%) ³⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Papua Barat	6,2—6,8	7,0—7,6	34,94—34,23	19,94—18,78	7,2—7,9	5,1—5,6
Papua	5,3—5,8	6,2—6,7	37,01—36,88	22,95—21,56	3,7—4,1	2,7—6,5

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).*

²⁾ *Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.*

³⁾ *Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.*

TABEL 8.5
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2010—2014

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾		Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾		Angka Harapan Hidup ³⁾		Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu) ⁴⁾	
	2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
Papua Barat	32	27	7,57	8,37	69,13	70,47	9.924,79	11.610,20
Papua	31	27	6,58	6,86	69,38	70,63	9.712,80	11.556,90

Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas;

*Keterangan: ¹⁾ *Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.*

²⁾ *Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.*

³⁾ *Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.*

4) Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

8.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu strategis wilayah Papua, arah kebijakan dan strategi wilayah Papua kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan sektor dan komoditas unggulan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan sentra produksi pertanian (Papua);
 - b. mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat);
 - c. mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat);
 - d. mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya.
2. Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif;
 - b. mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
3. Penguatan ekonomi daerah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas proses legislasi;
 - b. meningkatkan penegakan hukum, HAM serta transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kapasitas penduduk perdesaan dan rumah tangga miskin, baik secara individual maupun berkelompok;
 - b. memperluas kesempatan dan peluang pengembangan ekonomi lokal;
 - c. meningkatkan cakupan dan sebaran program penanggulangan kemiskinan.



5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
6. Pengendalian HIV/AIDS, dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS.
7. Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal;
 - b. menghormati dan memperkuat lembaga adat;
 - c. meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan pemuka adat dalam penanganan konflik.
8. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
 - b. memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah;
 - c. melaksanakan diversifikasi pangan.
9. Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua dilakukan dengan strategi pengembangan mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan publik.
10. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam dilakukan dengan strategi mengembangkan sistem mitigasi bencana.